

Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pilkada di Provinsi Banten 2011

Afdal Makkuraga Putra

Universitas Mercu Buana
afdalraga@yahoo.com

ABSTRACT:

Political system in Indonesia after New Order regime has entered into a new phase, which is both fundamentally and practically different. With the growth of freedom of expression and the rise of information and communication technology (ICT), the use and practices of political communication is also striking a fair balance, two-ways direction, no longer dominated by government-only apparatuses. The use of internet and New Media in political communication realm has been pioneered since 1997, and has been growing ever since, thanks to the new practices of local election (Pilkada). This paper will address firstly, the theoretical framework of political communication in e-Democracy, and secondly, the application of New Media (website, blog, and social media sites) in local-based political communication, namely Pilkada in Banten at October 23, 2011. Having analysed the phenomenon in question, a surprising result appears. Even though all candidates of Governor and Deputy Governor of recent Pilkada Banten have used New Media as their communication and campaign media, nevertheless the interactivity factor embedded within those "New Media use" are largely neglected.

Keywords: e-Democracy, political communication, New Media, interactivity.

Sebagaimana kita ketahui era reformasi di Indonesia membawa perubahan sistem politik yang sangat mendasar. Bila di zaman Orde Baru sistem politik kita bercorak otoriter, kini sistem politik bersalin rupa menjadi sistem politik liberal. Hal yang sangat dirasakan dari perubahan tersebut adalah terbukanya iklim kebebasan. Bila di Orde Baru kebebasan berorganisasi dan kemerdekaan pers dikekang oleh penguasa, kini kebebasan tersebut dinikmati sepenuhnya. Kebebasan itu tentu berdampak pada sistem politik, pemilu dan pers.¹ Dari sisi sistem kepartaian, kita saat ini menganut sistem multi partai, sangat berbeda dengan era Orde Baru yang membatasi warga negara membentuk partai politik.² Dari sisi sistem pemilu, selain multi partai, Presiden dan Wakil Presiden juga dipi-

lih secara bebas dan langsung. Sangat berbeda dengan Orde Baru yang menganut sistem pemilihan perwakilan. Kita saat ini juga sudah menganut sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR mewakili partai politik sedangkan DPD mewakili wilayah (provinsi). Melengkapi pemilihan presiden dan wakil presiden, kini bupati/walikota dan gubernur pun dipilih secara langsung, atau lebih dikenal dengan Pemilihan Kepada Daerah Langsung (Pilkada).³

Pers juga tak ketinggalan, setelah terbelenggu selama 32 tahun lebih kini insan pers di Indonesia sudah menikmati iklim kebebasan. Setiap warga negara di republik ini berkesempatan mendirikan institusi pers tanpa ada halangan dari pihak

manapun. Insan pers pun bebas mengeritik penguasa. Fungsinya sebagai anjing penggonggong (*watch dog*) benar-benar dinikmati.

Sejalan dengan iklim kebebasan dan perkembangan teknologi komunikasi kajian dan praktek komunikasi politik juga semakin menarik. Praktek komunikasi politik tidak lagi monoton dan dikontrol oleh pemerintah. Praktek komunikasi politik saat ini selain bentuk yang makin dinamis dan atraktif, juga kualitasnya sudah makin baik. Sekarang ini praktek komunikasi politik tidak hanya terjadi menjelang Pemilu lima tahunan, tetapi berlangsung hampir setiap saat sejalan dengan pemilihan Gubernur, Bupati/walikota dipilih secara langsung. Praktek tersebut bisa dilihat dari kampanye, debat kandidat, pencitraan sampai pada jajak pendapat.

Aplikasi media baru⁴ (internet) dalam ranah praktek komunikasi politik Indonesia mulai terlihat sejak awal tahun 1997, kala itu terdapat tiga *home page* yang cukup aktif, yakni: situs *apa kabar* yang dikelola oleh John McDougal, "KDP.net" yang dikelola oleh beberapa aktivis pijar dan Joyo Indonesia News yang dikelola Gordon Bishop dari New York. Ketiga *home page* itu digunakan sebagai sarana kampanye bagi mahasiswa untuk melawan rezim Orde Baru. *Home page* tersebut berusaha memberi penyadaran politik bagi masyarakat kelas menengah saat itu.⁵

Pada Pemilu 1997 sebenarnya penggunaan Internet untuk kampanye telah dimulai oleh partai Politik kala itu (PPP, Golkar dan PDI). Golkar dengan alamat www.golkar.or.id, Partai Persatuan Pembangunan online beralamat di www.ppp.or.id dan PDI meluncurkan Banteng Yes di alamat www.banteng.org. Informasi yang tersaji pada ketiga *website* tersebut meliputi program partai, pernyataan politik, susunan pengurus di tingkat pusat dan daerah, AD/ART

dan kesempatan dialog antara pengguna dan pengurus partai politik.

Penggunaan *website* bagi parpol kala itu memang memiliki keunikan tersendiri: *Pertama* dari segi biaya lebih murah dibanding dengan media cetak dan elektronik. Dengan membuat *website* kampanye di Internet bisa lebih murah dan efisien. Biaya yang dikeluarkan berupa membeli domain, desain *website*, pengelolaan dan *maintenance website*. *Kedua*, pesan-pesan yang terdapat dalam *website* dapat menjangkau seluruh dunia secara real time. Kemungkinan pesan-pesan tersebut bisa disebarkan secara simultan melalui *mailing list* dan *chatting room*. *Ketiga* *website* parpol juga dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi interaktif untuk mendukung tujuan partai politik atau kandidat legislator.

Pada Pemilu 2004 dan 2009 pemanfaatan internet sebagai medium komunikasi politik makin meningkat. Bukan saja partai politik yang memanfaatkannya, melainkan juga individu calon legislator (DPR dan DPD), pasangan calon Wapres dan Presiden ramai-ramai membangun *website*.

E-DEMOKRASI DAN KOMUNIKASI POLITIK

Asal mula demokrasi sebagai suatu system politik dapat ditelusuri ke belakang, yaitu sebelum abad ke-5 M ketika Yunani menciptakan *the polis (the city-state atau the city-community)*, dan mencoba menjawab pertanyaan: bagaimana seharusnya sebuah system politik diorganisasikan guna memenuhi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Secara terminology kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang bermakna rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti yang berarti kekuasaan, jadi kata demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa (*government by the people*)

(Budiardjo, 2010:105). Meskipun kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi susah untuk diimplementasikan.

Menurut Larry Diamond (dalam Zuhro, dkk, 2009:14), Ada tiga asumsi umum yang lekat dengan konsep demokrasi. Pertama, demokrasi tidak hanya penting dan mungkin merupakan bentuk terbaik pemerintahan yang bisa diciptakan, melainkan juga suatu doktrin politik yang menguntungkan banyak negara. Asumsi ini tidak hanya didukung oleh AS, melainkan juga beberapa negara Eropa Barat lainnya yang memproklamasikan dirinya sebagai model demokrasi modern.

Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki sejarah panjang, berakar dalam sejarah Yunani kuno. Sebagai bentuk yang ideal, meskipun mungkin bukan sebagai suatu sistem, demokrasi bertahan melalui lingkungan politik yang tidak ramah. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang natural/alami sehingga bila orang di negara manapun memenangkan kebebasan untuk memilih sistem politiknya, mereka akan memilih demokrasi.

Meskipun demikian, asumsi tersebut di atas masih diperdebatkan. Dalam kenyataannya, terdapat perbedaan dalam mempraktikkan demokrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Sebagai akibatnya, mendefinisikan demokrasi tidaklah mudah dan sederhana. Sebagai contoh, suatu negara mungkin dipandang demokratis bila negara tersebut memiliki parlemen, sistem partai, dan pemilu. Kalau ciri-ciri tersebut digunakan untuk menilai demokrasi suatu negara, akan banyak negara yang mengklaim dirinya demokratis. Menurut Rosenberg, negara yang demokratis adalah suatu negara yang di dalamnya ada *the democratic movement rules*. Meskipun demikian, kiranya harus pula dibedakan antara bentuk dan substansi. Sebab, ada suatu negara yang memiliki lembaga politik

demokratis, sementara sikap yang ditunjukkannya adalah otoritarian atau anti-demokrasi.⁹

Feith berpendapat bahwa tuntutan prinsip demokrasi adalah kebebasan individu dan kelompok untuk mengontrol negara. Demokrasi menurutnya merupakan suatu rangkaian kelembagaan yang membuat pemerintah *legitimate* dalam masyarakat dimana sebagian besar rakyat dipengaruhi ideologi (liberalisme, sosialisme, nasionalisme, feminisme dan lingkungan) demokrasi modern (Zuhro, dkk, 2009:14).

Lebih jauh Feith mengatakan bahwa munculnya kembali demokratisasi berkenan dengan industrialisasi dan ekonomi, politik dan transformasi sosial, naiknya tingkat pendidikan, dan meluasnya media massa serta bangkitnya kelas bisnis, profesional, dan buruh.

Selain itu, demokrasi juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau sistem politik yang ideal dan bahkan nyaris 'sempurna'. Akan tetapi, demokrasi sebenarnya juga terkait dengan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Oleh karena itu, demokrasi juga mengandung nilai-nilai (*values*) tertentu yang dianggap baik oleh masyarakat.

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu: penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga; terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; pergantian pimpinan secara teratur; pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan) secara minimum; pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman serta jaminan penegakan keadilan (Budiardjo, 2010:117).

Senada dengan Mayo, Carter dan Hertz mengkonseptualisasi tujuh ciri demokrasi, yaitu: pembatasan terhadap tindakan pemerintah dengan menjamin terjadinya pergantian pemimpin secara berkala, tertib, damai, melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapatan yang berlawanan; menjamin perasamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik; kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perorangan termasuk bagi pers dan media massa; penghormatan terhadap hak rakyat untuk memberikan pendapatnya betapapun tampak salah dan tidak populer; penghargaan terhadap hak-hak minoritas dan perorangan; dan penggunaan cara persuasif dan diskursif ketimbang koersif dan represif (Budiardjo, 2010:117).

Sedangkan Robert A. Dahl mengajukan lima kriteria demokrasi, yakni; persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan; kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputuskan melalui pemerintahan; dan terliputnya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Budiardjo, 2010:117).

Selanjutnya. Andrews dan Chapman mengemukakan enam ciri demokrasi, yaitu hak suara yang luas; pemelihan umum yang bebas dan terbuka; kebebasan berbicara dan berkumpul; penghargaan atas *rule of law*; pemerintahan

yang bergantung pada parlemen; dan badan pengadilan yang bebas (Zuhro, dkk, 2009:19).

E-DEMOKRASI

Istilah e-Demokrasi sebenarnya merujuk pada penggunaan media baru (New Media) dalam ranah politik. Penggunaan media baru tersebut dianggap dapat memperkaya partisipasi warga dalam sosialisasi politik, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh parlemen, dapat melibatkan warga lebih dalam karena akses terhadap informasi juga diketahui oleh warga, demikian juga bahwa akses warga untuk berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan juga semakin terbuka, cepat dan murah.

e-Demokrasi sering dikaitkan dengan pemanfaatan *website* oleh partai politik, lembaga eksekutif, eksekutif dan legislatif, pemungutan suara secara elektronik, mengirim email ke perwakilan politik dan diskusi-diskusi politik melalui internet serta pelayanan publik melalui internet (Thomas Zittel, 2004).

e-Demokrasi juga dapat diartikan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyusun strategi pada proses politik dan pemerintahan. "e-Demokrasi senantiasa berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melibatkan warga untuk mendukung proses pengambilan keputusan demokratis dan memperkuat demokrasi perwakilan. e-Demokrasi bertujuan untuk menjaring partisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif melalui Internet, komunikasi bergerak, dan teknologi lainnya dalam sistem demokrasi.

Penelitian Rutger University mengatakan bahwa pesan-pesan politik di *website* memiliki kontribusi pada demokrasi langsung yang lebih partisipatoris (Barber dalam Linda Lee Kaid, 2004). Kontribusi tersebut dapat terjadi karena:



1. Melekatnya sifat interaktivitas pada internet
2. Potensial untuk komunikasi yang lateral dan horizontal
3. Point to point komunikasi
4. Berbiaya murah
5. Sebagai medium komunikasi yang cepat
6. Hilang atau berkurangnya batas-batas nasional
7. Bebas dari Campur tangan

Pengaplikasian media baru dalam dunia politik diharapkan memperkaya kualitas partisipasi politik itu sendiri. Kehadiran berbagai macam fitur-fitur di internet memungkinkan publik untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan public. Oleh karena itu sebagian pakar percaya bahwa pengaplikasian *new media* dalam dunia politik dapat mewujudkan konsep ruang public (*public sphere*) seutuhnya seperti yang dicita-citakan oleh Jurgen Habermas.

Habermas mengharapkan ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik itu harus mudah diakses semua orang.

Tak heran kemudian McQuail menaruh harapan besar lahirnya partisipasi politik yang utuh, oleh karena itu kata Mc-

Quail media baru secara luas disambut sebagai cara yang potensial untuk lari dari politik “top-down” yang operesif dari demokrasi massa, di mana partai politik yang teroganisir secara ketat membuat kebijakan secara sepihak dan memobilisasi dukungan.

Lanjut McQuail media baru menyediakan informasi publik yang sangat beragam dan banyak, akses yang tidak terbatas bagi semua sehingga memungkinkan dialog langsung antara pengurus partai dengan pengikutnya. Dialog yang berlangsung pun berjalan bebas karena kontrol aparaturnegara hampir tidak ada.

KOMUNIKASI POLITIK

Fagen mendefinisikan komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Cakupannya meliputi studi mengenai jaringan komunikasi (organisasi, kelompok, media massa, dan saluran-saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud (Nasution, 1990:24-26).

Sedangkan menurut Galnoor komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Nasution, 1990:24-26). Rumusan Galnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan Powell yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan dengan fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik.

McNair memberikan batasan komunikasi politik secara lebih luas yakni semua komunikasi yang bertujuan politik. Ia

memberikan tiga batasan komunikasi politik:

1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politikus dan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan yang spesifik
2. Komunikasi yang ditujukan kepada aktor politik dari individu (non politik) seperti pemilih atau kolumnis di media
3. Komunikasi tentang aktor-aktor politik dan aktivitas mereka baik yang termuat dalam pemberitaan media massa ataupun dalam bentuk-bentuk media lain.

Singkatnya, menurut McNair semua wacana politik termasuk dalam definisi komunikasi politik. Wacana politik tersebut tidak hanya yang bersifat verbal atau pernyataan tertulis tetapi juga meliputi non verbal seperti, gaya pakaian, gerak-gerik tubuh (*gesture*) dan desain logo (McNair, 2003:4).

Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, proses komunikasi politik berangkat dari formula yang dikemukakan oleh Harold Laswell yang berbunyi: *siapa berkata apa, kepada siapa, melalui saluran apa dan bagaimana efeknya*. Komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber (komunikator) kepada khalayak, dengan menggunakan media (*channel*) tertentu untuk mencapai tujuan yang tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur tersebut secara keseluruhan.

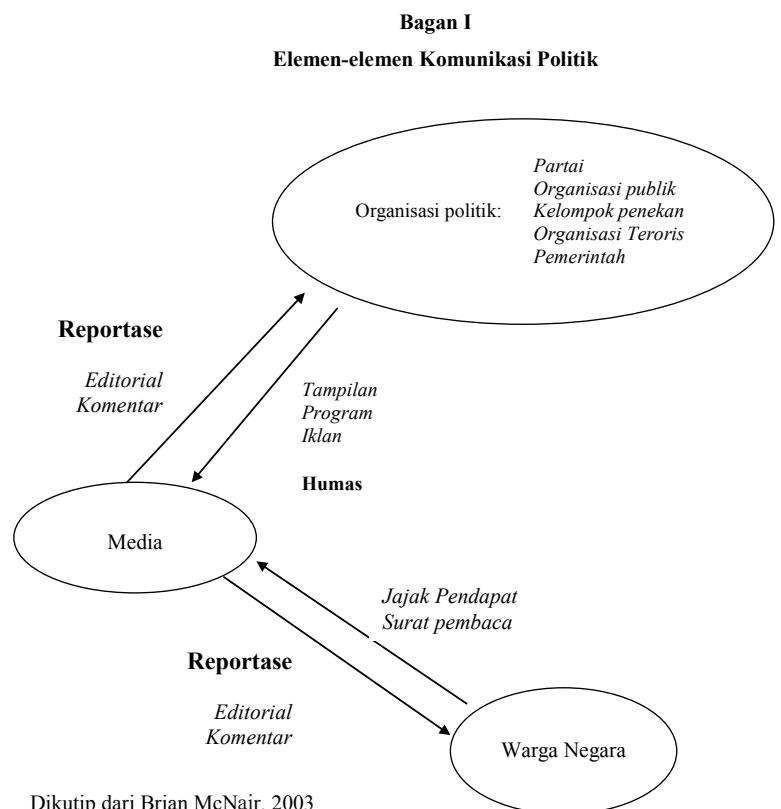
McNair mengemukakan komponen komunikasi politik terdiri dari tiga unsur utama, sebagai berikut (McNair, 2003:6) :

1. Organisasi politik
2. Media
3. Warga negara (*Citizens*)

Sedangkan menurut Gurevitch dan Blumler (Nasution, 1990:42), komponen-komponen sistem komunikasi politik meliputi:¹⁹

1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya
2. Institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya
3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik
4. Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.

Untuk lengkapnya, elemen-elemen komunikasi politik dapat dilihat dari bagan berikut ini:



Dan Nimmo menguraikan bahwa cakupan komunikasi politik meliputi: komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik dan akibat-akibat komunikasi politik.

Dan Nimmo mengatakan setidaknya terdapat dua tujuan komunikasi politik (Nimmo dan Rakhmat, 2001:85):

1. Belajar tentang politik (*political education*). Belajar politik berlangsung sela-

ma sepanjang hidup manusia melalui proses yang disebut sosialisasi politik. Nah disini-lah peranan komunikasi politik berguna untuk proses pembelajaran politik. Pembelajaran politik itu terjadi dari proses pertukaran informasi. Aktor-aktor politik dapat belajar memahami konstituen dan masyarakat dari pemberitaan media. Begitu juga sebaliknya masyarakat pun dapat belajar untuk meningkatkan pemahaman berpolitik melalui

Tabel 1

Dimensi Komunikasi Politik dalam E-Demokrasi

Dimensi	Variabel	Indikator
Public right to know	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi tentang kandidat • Tersedianya informasi visi dan misi kandidat • Tersedianya informasi tentang program kerja yang akan dilakukan oleh kandidat bila terpilih 	Tersedianya layanan interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat
Partisipasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan 	Tersedianya layanan interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat
Transparansi dan Accountability	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi tentang jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik • Tersedianya informasi tentang besarnya dana kampanye yang digunakan dalam Pilkada/ 	Tersedianya layanan interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat
Pelaksanaan Pemilu yang independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan atas terselenggaranya pemilu untuk peralihan kekuasaan dari warga Negara ke pemimpin • Jaminan atas hak untuk memilih dan dipilih • Jaminan atas keterwakilan dalam parlemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi pemilu di berbagai medium media baru • Tersedianya fasilitas e-election
Media yang Independen dan Bebas	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan atas independensi media dari control dan pengaruh Negara • Jaminan atas kepemilikan privat atas media 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya akses terhadap media bagi public • Kemampuan dan kemampuan media untuk merepresentasikan berbagai alur opini dan perspektif • Kemampuan dan kemauan untuk bertindak sebagai pengawas pemerintahan • Sejauh mana terjadinya pelecehan dan kekerasan terhadap media • Sejauh mana adanya pembatasan atas kebebasan pers.

pemberitaan-pemberitaan politik, debat publik yang ditayangkan oleh media massa. 2. Berpartisipasi dalam politik (*political participation*) ; melalui proses pembelajaran politik tersebut, orang mengembangkan kepercayaan, nilai dan pengharapan yang selanjutnya mendorong orang untuk berpartisipasi dalam politik. Wujud partisipasi tersebut berupa: partisipasi dalam pemilihan umum, identifikasi dengan partai politik, pendaftaran untuk memilih, pengambilan bagian dalam kampanye, mengikuti informasi tentang politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, masuk organisasi kepentingan umum dan politik

ANALISIS WEBSITE CALON PILKADA BANTEN

Penjelasan dibawah ini merupakan analisis penggunaan media baru dalam Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Banten yang berlangsung Sabtu 23 Oktober 2011, Pilkada tersenut diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu : Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE berpasangan dengan H. Rano Karno. Pasangan ini didukung oleh 11 Partai Politik yakni partai Golkar, PDI-Perjuangan, Hanura, Gerindra, PKB, PBB, PAN, PKPB, PPN, PDS, PPD. Pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita didukung oleh Partai Demokrat, dan pasangan Jazuli Juwaini, MA dan Makmun Zakki yang didukung oleh empat partai: PKS, PPP, PBR dan PKNU.

Hj. Ratu atut Chosiyah, SE yang berpasangan dengan H.Rano Karno mencalonkan diri sebagai pasangan Gubernur dan wakil gubernur banten periode 2012-2017. Pasangan ini didukung oleh 11 partai yakni partai Golkar, PDI-Perjuangan, Hanura, Gerindra, PKB, PBB, PAN, PKPB, PPN, PDS, PPD.

Pasangan ini boleh dikatakan memanfaatkan hampir semua *new media* (termasuk media sosial) dalam mengkampanyekan diri mereka menuju Gubernur Banten 2012-2017. Pasangan ini tercatat memiliki *website* yakni: <http://ratuatut.com>, <http://bantenbersatu.com> dan <http://ibuatut.com>.

Website ratuatut.com dan bantenbersatu.com memiliki tampilan dan konten yang persis sama. Boleh dikatakan tampilan kedua *website* tersebut cukup menarik dan atraktif. Disamping ketiga *website* tersebut, pasangan ini juga memiliki jejaringan di media sosial: facebook, twitter, blogger dan kompasiana.

Tampilan ratuatut.com dan bantenbersatu.com, lebih menyerupai portal berita, tulisan-tulisan di dalam kedua *website* tersebut didesain seperti tulisan berita lurus (*straight news*). *Website* tersebut memiliki kategori yakni, Home, Berita, Artikel/Resensi, Sudut Banten, Pemilu, Testimoni/inspirasi, Diary/Inspirasi, Profil dan Hubungi kami

Secara umum *website* tersebut memiliki fasilitas "*add comment*" pada semua artikelnya yang memungkinkan pengunjung (*visitor*) memberikan umpan balik (*komentar*). Fasilitas ini merupakan ciri *website* 2,0 yang memungkinkan pengunjung berpartisipasi atau berinteraksi dengan si empunya *website* dan para pengunjung yang lain. Namun sayangnya fasilitas tersebut kurang terpakai oleh pengunjung. Dari amatan selintas, terlihat beberapa artikel tidak dikomentari oleh pengunjung.



Bila ditelisik lebih dalam, *website* tersebut secara umum hanya berisikan informasi tentang, siapa kandidat dan apa yang telah kandidat lakukan (*track record*). Informasi tentang visi, misi dan program kerja kandidat hanya muncul dalam satu artikel berita. Visi dan misi tersebut termuat dalam artikel yang berjudul: Ratu Atut-Rano Karno Usung 12 Program Unggulan. Artikel ini diunggah pada 5 Oktober 2011, yang disimpan pada kategori Pemilu. Ke 12 program unggulan tersebut terangkum dalam 5 Misi utama pasangan ini. Namun sekali lagi sangat disayangkan walaupun artikel ini telah menyediakan ruang komentar, namun sama sekali tidak terkomentari.

Informasi tentang keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan sama sekali tidak ada, begitu juga dengan harta dan kekayaan serta dana kampanye kandidat tidak ada sama sekali. *Website* tersebut lebih menyampaikan aspek pencitraan kandidat daripada mengajak warga untuk terlibat dalam proses partisipatif.

Bagaimana dengan media sosial *facebook*: Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE? postingan status/wall pada umumnya *share link* ke ratuatut.com. Namun, berbeda dengan *website* resmi, komentar-komentar untuk setiap postingan tersebut boleh dibilang berlimpah. Hasil amatan sekilas menunjukkan bahwa rata-rata yang memberikan komentar rata-rata di atas 20 *komen*. Namun lagi-lagi disayangkan Ratu Atut, sangat jarang bahkan hampir tidak pernah membalas komentar-komentar yang masuk, baik yang sifatnya mendukung maupun yang kontra.

Tidak adanya respon yang diberikan oleh Ratu Atut atau pengelolanya di Fan Page FB-nya selain mengingkari sifat FB yang interaktif juga merupakan

“dosa” media berbasis Internet yang memang berkarakter interaktif tersebut.



Pasangan Jazuli- Zakki juga membuat *website* resmi guna mendukung pencalonannya sebagai Gubernur Banten. *Website* mereka berdomain: <http://jazulijuwaini.com>. Tampilan *website* ini didominasi warna kuning warna identitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dalam *website* tersebut berisi delapan kategori yakni: Beranda, Profil, Agenda, Berita, Press Release, Galeri Foto Kegiatan, Al-Quran dan Video.



Tampilan *Website* Jazuli-Zakki memang tidak meriah dan semegah *website* Atut-Rano. Informasi yang disediakan di *website* ini lebih sedikit dari pada punya Atut-Rano. Pada kategori Beranda, berisi 7 *headline* berita. Dari 7 berita tersebut secara umum berisi dua kualifikasi yakni: berita kegiatan Jazuli dan fakta kegagalan pembangunan Banten.

Secara sepintas terlihat bahwa *website* lebih dominan diisi oleh informasi tentang kandidat (siapa kandidat), *track record*

kandidat. Artikel-artikel didalamnya berusaha "membeberkan" unsur negatif kandidat lain ataupun pencapaian kandidat lain. Misalnya pada salah berita headline-nya yang berjudul Tingginya Inflasi Membebani Ekonomi Masyarakat Banten. Berita ini diunggah pada 03 Agustus 2011. Pada intinya berita tersebut menceritakan dengan Inflasi yang mencapai 1,24% dapat membebani masyarakat Banten yang tergolong masih tinggi tingkat pengangguran terbuka-nya yang 13, 50%.⁶

Di samping pada tampilan antar muka terdapat pula fasilitas jajak pendapat (*polling*) yang menanyakan siapa calon gubernur banten pilihan anda? Hasil polling menunjukkan bahwa Jazuli menempati urutan pertama dengan 530 suara atau 84%, tempat kedua diduduki oleh Wahidin Halim dengan 68 suara atau 10,8% dan ketiga ditempati oleh Ratu Atut Chosiyah dengan 33 suara atau 5,2%. Tentu saja hasil polling ini belum menggambarkan pendapat masyarakat Banten secara keseluruhan.

Bila dibandingkan dengan informasi visi dan misi Jazuli dan Atut; milik Jazuli lebih gampang ditemukan daripada milik Atut. Visi dan Misi Jazuli tersimpan dalam anak kategori profil, sehingga begitu kategori profil diklik maka akan muncul bentangan visi dan misi tersebut. Selain itu visi misi tersebut ternarasi dengan detail dan disimpan dalam format adobe PDF dan pengunjung dapat pula mengunduhnya. Berbeda dengan Atut, visi dan misi tersebut berserak diantara belantara berita lain. Namun sayang sekali informasi visi dan misi Jazuli tidak memiliki fasilitas "add comment" sehingga warga yang ingin melakukan dialog interaktif dengan kandidat Jazuli tidak terwujud. Padahal keberadaan fasilitas "add comment" merupakan karakter dari interactivity tersebut.

Sama dengan Ratu Atut, Informasi keterlibatan publik dalam pengam-

bilan keputusan dalam hal kebijakan-kebijakan yang akan diambil sama sekali tidak ada, begitu juga dengan informasi tentang harta dan kekayaan serta dana kampanye kandidat tidak ada sama sekali. Secara umum *website* tersebut lebih menguraikan aspek pencitraan kandidat daripada mengajak warga untuk terlibat dalam proses partisipatif.

Pasangan kandidat yang didukung oleh PKS ini juga membuat *hyper-link* ke dua media sosial yakni *Facebook* dan *Twitter*. Pada fan-page FB Jazuli sampai dengan 10 November 2011 baru ter-like sebanyak 775 orang, jauh tertinggal dari FB Atut yang sudah mencapai 8,733 orang. Yang membedakan FB *fan page* Jazuli dan Ratu Atut adalah sisi jumlah komentar, komentar yang masuk ke Jazuli jauh lebih sedikit dari pada FB Atut. Pada FB Jazuli postingan status dan *share link* hanya di bawah 10 komentar. Meskipun begitu beberapa kali Jazuli merespon atas komentar yang masuk dari *follower*-nya.



Bagaimana dengan Pasangan Wahidin Halim? Walikota Tangerang ini juga tak ketinggalan menggunakan medium *website* guna mendukung pencalonannya sebagai Gubernur Banten. *Website* Wahidin beralamat: <http://walikota.tangerangkota.go.id/>.

Apa saja sajian *website* Wahidin? Begitu kita membuka situsnya terlihat foto Wahidin dalam balutan pakaian dinas

resmi berwarna putih. Tampilan situs ini terlihat sangat sederhana dan polos. Pada tampilan antar muka terdapat dua kategori yakni Menu Utama dan Agenda. Keduanya diletakkan pada sisi kiri secara vertikal. dalam Menu Utama ini memiliki anak kategori; Halaman Utama, Masa Kecil, Keluarga, Pendidikan, Jabatan, Penghargaan, Organisasi, Karya tulis dan Kebijakan. Kategori lainnya bertajuk Agenda yang memiliki anak kategori: Keagamaan, Dialog, Kunjungan Kerja dan Peresmian/Pertemuan.

Pada Halaman Utama berisi sekapur sirih atau kata sambutan Wahidin, pada halaman Masa Kecil berisikan informasi masa kecil Wahidin yang hidup sederhana dan penuh perjuangan dalam meraih cita-cita.

Di sisi sebelah kiri terdapat lima *teaser*: yakni Interaktif; Buku Tamu, Galeri Foto, Polling, Statistik Pengunjung dan Tamu.



Secara umum informasi yang tersedia dalam situs Wahidin masih didominasi tentang siapa kandidat, pencapaian kandidat dan *track record* Wahidin. Situs ini sama sekali tidak menginformasikan visi dan misi sebagai Kandidat Gubernur Banten. *Website* ini juga kurang interaktif. Semua artikel yang ada di situs tersebut sama sekali tidak memiliki fasilitas "add comment". Padahal fasilitas ini merupakan ciri interaktivitas sebagaimana ciri new media. Satu-satunya fasilitas

interkatif di situs ini ada pada kategori interaktif. Kategori ini berisi respon dan unek-unek pengunjung yang disampaikan ke Wahidin. Namun sayang sekali, lagi-lagi Wahidin tidak menanggapi respon pengunjung tersebut. Tindakan ini sama saja menghinai sifat internet itu sendiri yakni interaktivitas.

KESIMPULAN

Berkaca pada pada kasus Pilkada Provinsi Banten semua kandidat memiliki situs resmi bahkan tak luput memanfaatkan situs-situs jejeraing sosial seperti facebook dan twitter. Namun sayang sekali meskipun sudah memiliki fasilitas interaktif, hampir semua situs tersebut kurang interaktif alias masih satu arah. Terlihat mereka hanya ingin menginformasikan, belum mendorong agar pengunjung menyampaikan pandangan dan aspirasinya dan kemudian berinteraksi. Barangkali ini juga terkait dengan sikap pengunjung dunia maya di Indonesia yang juga belum interaktif.

REFERENSI

- [1] Dasar hukum kebebasan itu bisa dilihat dari sejumlah UU yang telah disahkan, misalnya, pasal 28 F UUD 1945, kebebasan pers UU No 40/99, UU No. 12 tentang Pemilu Legislatif, UU No. 23 Tentang Pilpres dan Wapres. UU No. 21/2002 tentang Parpol.
- [2] Di era Orde Baru, Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik, tahun 1973 pemerintah melakukan kebijakan fusi partai, sehingga pada pemilu 1977 peserta pemilu menjadi dua partai dan satu organisasi kekeayaan (PDI, PPP dan Golkar)
- [3] Dasar hukum Pilkada adalah UU No. 32/2004.
- [4] Memang belum ada formulasi yang tepat untuk menggambarkan tentang media baru, namun menurut McQuail

media baru memiliki dua unsur utama yakni: Digitalisasi dan Konvergensi. Internet merupakan bukti konvergensi karena menggabungkan beberapa fungsi media lain seperti audio, video dan teks. Lihat McQuail's Mass Communication Theory, 6th ed, Sage Publication

- [5] Lihat Media dan Pemilu terbitan SEAPA Jakarta bersama Koalisi Media Untuk Pemilu Bebas dan Adil, 2004, hal 96-98.
- [6] Pada tanggal 8 November 2011 di *website* www.ratuatut.com muncul berita berjudul Pemprov Banten Berhasil Turunkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berita ini seolah-olah merspon berita yang dipublikasi Jazuli diwebsitenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lee Kaid, Linda. (2004). *Handbook Political Communication Research*. London (UK): Sage Publication.
- Liliker, G Darren. (2006). *Key Concepts In Political Communication*. London (UK): Sage Publication.
- McNair, Brian. (2003). *An Introduction to Political Communication*. London dan USA: Routledge.
- McQuail, Denis. (2006). *Mass Communication Theory, 6th edition*, London (UK): Sage Publication.
- Nasution, Zulakarimen. (1990). *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nimmo, Dan dan Jalaluddin Rakhmat. (2001). *Komunikasi Politik: Khalayak & Efek*. Bandung: Rosda.
- Zuhro, Siti, dkk. (2009). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.